



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: 1
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin 2 September 2024
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pembahasan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; 2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025; 3. Pembahasan Program Perlindungan Anak; 4. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqi Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 40 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri PPPA beserta jajaran; 3. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan agenda "Pembahasan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, Pembahasan Program Perlindungan Anak, dan Isu-isu Aktual" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp284.979.106.172,- atau 97,82% dari Pagu Anggaran sebesar Rp291.326.942.000,- dengan Realisasi Anggaran menurut Satuan Kerja sebagai berikut:

NO	Nama Satker	Total		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Kementerian PPPA	140.136.653.000	135.327.892.322	96,57
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	30.555.348.000	30.225.441.621	98,92
3	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	38.566.201.000	37.919.074.073	98,32
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	205.985.000	201.264.722	97,71
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	38.328.862.000	38.036.853.440	99,24
6	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	29.083.761.000	28.890.610.196	99,34
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	14.450.132.000	14.377.969.798	99,50
JUMLAH		291.326.942.000	284.979.106.172	97,82

2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pengelolaan anggaran Kementerian PPPA RI tahun anggaran 2023 dengan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik PPA tahun 2023 sebesar Rp99.178.329.205,- atau 81,47% dari Alokasi DAK NonFisik PPA Tahun 2023 sebesar Rp132.000.000.000,- yang diberikan kepada 275 daerah (33 Provinsi dan 242 Kab/Kota). Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian PPPA RI untuk dapat mengevaluasi daerah penerima DAK NonFisik PPA tahun anggaran 2023 yang angka penyerapannya rendah atau daerah yang terlambat menyampaikan laporan untuk dipertimbangkan kembali mendapatkan DAK NonFisik PPA pada tahun anggaran berikutnya.

4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.654.181.000,-. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari Pagu Indikatif yang ditetapkan sebelumnya, namun terdapat pergeseran pagu antar program, dengan rincian menurut Satuan Kerja sebagai berikut:

(dalam ribuan)

No	Satuan Kerja	Rincian Pagu Rancangan Renja Tahun 2025			
		Operasional	Non Operasional		Jumlah
			Prioritas Nasional	Non Prioritas Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	Sekretariat Kementerian	124.386.040	1.820.000	25.187.634	151.393.674
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.275.000	32.081.448	3.500.000	37.856.448
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	2.085.798	25.562.681	2.761.644	30.410.123
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2.112.982	25.445.378	3.450.000	31.008.360
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	2.271.404	28.098.040	2.600.000	32.969.444
6	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	9.271.623	4.930.000	2.814.509	17.016.132
Jumlah		142.402.847	117.937.547	40.313.787	300.654.181

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian PPPA RI untuk dapat melaksanakan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian PPPA RI untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.763.613.000,- dengan rincian menurut Satuan Kerja sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Rincian Output	Alokasi
1	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	<u>Koordinasi Strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan</u>	8.400.000.000,-
2	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Koordinasi Strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KDRT dan TPPO	8.660.000.000,-
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Koordinasi Strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	6.040.000.000,-
4	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Koordinasi Strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Khusus Anak, TPKS, dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	16.900.000.000,-
5	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, TPKS, dan SPPA	15.000.000.000,-
6	Sekretariat Kementerian	Layanan Perkantoran	15.763.613.000,-
		JUMLAH	70.763.613.000,-

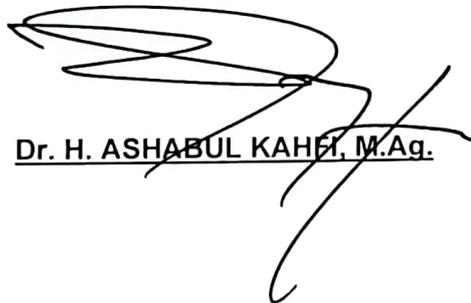
6. Komisi VIII DPR RI dapat memahami alokasi DAK Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Fisik PPA) tahun 2025 berdasarkan surat bersama Pagu Anggaran dan hasil review Kementerian Keuangan sebesar Rp96.961.090.487,- yang ditujukan bagi 42 daerah penerima, sedangkan DAK Nonfisik PPA tahun 2025 berdasarkan Pagu Anggaran adalah sebesar Rp132.000.000.000,- yang ditujukan bagi 305 daerah penerima.
7. Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan alokasi anggaran perlindungan anak Indonesia sebagai wujud hadirnya negara serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia.
8. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mendorong agar segera menerbitkan regulasi turunan dan mengoptimalkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
  - b. Menindaklanjuti temuan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PPPA RI tahun 2023.

- c. Meminta KPAI untuk meningkatkan kinerja dalam merespons pengaduan dari masyarakat.
- d. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka meningkatkan capaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,



Dr. H. ASHABUL KAHEFI, M.Ag.